

Judul : Tiru negara maju lindungi komoditas unggulan
Tanggal : Sabtu, 06 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tiru Negara Maju Lindungi Komoditas Unggulan

Senayan Ingin Hadirkan RUU Komoditas Strategis

Senayan memandang penting adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis. Beleid ini akan menjadi instrumen perlindungan produk unggulan nasional yang bernilai ekonomi tinggi.

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, komoditas strategis bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

"Barang-barang ini bisa berupa bahan pangan, bahan baku industri, hingga sumber energi vital yang menopang kehidupan masyarakat dan kemajuan negara," ujar Firman, Jumat (5/9/2025).

Firman menilai, aturan ini krusial menjaga keberlangsungan sektor pertanian, perkebunan dan industri, sekaligus mencegah praktik perdagangan yang merugikan Indonesia. Selama

ini, komoditas strategis lebih terfokus pada beras. Padahal Indonesia memiliki potensi besar pada sawit, tembakau, singkong dan tebu.

"Singkong, misalnya, bisa menjadi substitusi pangan sekaligus bahan baku bioetanol untuk energi baru terbarukan," jelas politikus Partai Golkar itu.

Firman juga menyinggung praktik negara maju yang melindungi komoditas unggulannya lewat regulasi dan subsidi. Amerika Serikat punya UU yang melindungi gandum, kedelai, jagung, dan kapas. Turki memiliki UU pertembakauan untuk menjaga daya saing



Firman Soebagyo

ekspor.

"Mereka melindungi komoditas dengan subsidi, tapi tidak pernah ditegur WTO (World

Trade Organization). Kalau Indonesia yang melakukan, langsung ditegur. Kita tidak boleh diam," tegasnya.

Dia mencontohkan nilai ekonomi tembakau yang mencapai Rp 216 triliun pada kuartal III, serta sawit yang pernah menyumbang Rp 500-700 triliun bagi negara.

"Undang-undang ini dibuat untuk melindungi komoditas strategis yang berdampak besar bagi bangsa, sekaligus meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menambahkan, RUU Komoditas Strategis akan dirumuskan dalam bentuk *omnibus law*. Pengaturan ini dinilai tepat karena mencakup banyak komoditas, mulai dari singkong, beras, hingga tembakau.

"Makanya disebut omnibus, karena banyak masukan. Nantinya akan diatur tata kelola dan tata niaganya dari hulu sampai hilir," jelas legislator Gerindra itu.

Bob menilai, omnibus law akan memperkuat perlindungan sektor pertanian, perkebunan, dan industri, sekaligus membatasi impor ilegal yang merugikan ekonomi nasional. Sejumlah isu lama, termasuk RUU Pertembakauan yang belum rampung, akan digabung dalam RUU Komoditas Strategis.

"Di dalamnya nanti ada bab tembakau, bab tebu, bab lainnya. Target kami, pembahasan RUU ini selesai tahun ini. Draf disusun berdasarkan naskah akademik yang sedang difinalisasi. Untuk lembaga pengawas, itu menjadi kewenangan Pemerintah," tandasnya. ■ **PVB**